



Implementasi Kebijakan Bantuan Pasang Baru Listrik Di Sebagian Kabupaten Di Provinsi Bengkulu

Aji Umar Za^{1*}, Triyuni Soemartono², Roy Tumpal Pakpahan³

^{1,2,3}Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

*Corresponding Author: ajimobilindo73@gmail.com

Submit: 1 Mei 2025, Diterima: 1 Juni 2025, Terbit: 30 Juni 2025

Abstrak

Tujuan Penelitian. Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan, hambatan, upaya dan *forecast* yang dilakukan guna mengoptimalkan kebijakan bantuan pasang baru listrik di sebagian Kabupaten di Provinsi Bengkulu. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan, hambatan, upaya dan *forecast* yang dilakukan guna mengoptimalkan kebijakan bantuan pasang baru listrik di sebagian Kabupaten di Provinsi Bengkulu.

Bahan dan metode. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan melakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun teori yang digunakan

Hasil. Berdasarkan data dan analisa yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi bantuan pasang baru listrik di sebagian Kabupaten di Provinsi Bengkulu, dapat dilihat dari temuan-temuan sebagai berikut: (1) Implementasi Bantuan Pasang Baru Listrik Di Sebagian Kabupaten di Provinsi Bengkulu sudah sesuai dengan hasil pembahasan Desk Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. (2) Hambatan dalam implementasi bantuan pasang baru listrik di sebagian Kabupaten di Provinsi Bengkulu, antara lain masih terdapatnya ketidakcocokan antara masyarakat pengusul dengan realita dilapangan dan rumah masyarakat pengusul berada diluar jangkuan jaringan listrik PLN. (3) Upaya yang perlu dilakukan guna mengoptimalkan implementasi bantuan pasang baru listrik di sebagian Kabupaten di Provinsi Bengkulu yaitu mensosialisasikan bantuan pasang baru listrik kepada masyarakat kurang mampu. (4) *Forecast* kedepan dengan adanya listrik yang menjangkau hingga ke pelosok desa diharapkan bagi masyarakat yang telah mendapatkan bantuan pasang baru listrik diharapkan dapat memanfaatkan bantuan dengan sebaik-baiknya seperti dipergunakan untuk membangun kegiatan UKM yang dapat dijadikan tambahan penghasilan bagi masyarakat tersebut.

Kesimpulan. Implementasi bantuan pasang baru listrik di sebagian kabupaten di Provinsi Bengkulu telah berjalan cukup baik, meskipun masih menghadapi

kendala koordinasi dan jangkauan jaringan, serta memerlukan peningkatan sosialisasi dan sinkronisasi data guna mendukung pemanfaatan listrik yang lebih produktif bagi kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Bantuan Pasang Baru Listrik

Abstract

Study purpose. *This study focuses on the implementation of policies, obstacles, efforts, and forecasts made to optimise new electricity connection assistance policies in several districts in Bengkulu Province. The objectives of this study are to analyse the implementation of policies, obstacles, efforts, and forecasts made to optimise new electricity connection assistance policies in several districts in Bengkulu Province.*

Materials and Methods. *The research method used in this study is a qualitative method with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The data obtained will be analysed through data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The theory used is*

Results. *Based on the data and analysis conducted, it can be concluded that the implementation of new electricity connection assistance in some districts in Bengkulu Province can be seen from the following findings: (1) The implementation of new electricity connection assistance in some districts in Bengkulu Province is in line with the results of the discussion by the Desk for Government Affairs in the Energy and Mineral Resources Sector at the Technical Coordination Meeting on Development Planning for 2024, conducted by the Directorate General of Regional Development at the Ministry of Home Affairs. (2) Challenges in the implementation of new electricity connection assistance in certain districts of Bengkulu Province include discrepancies between the proposals submitted by the community and the actual conditions on the ground, as well as the fact that the homes of the proposing community are located outside the reach of PLN's electricity network. (3) Efforts needed to optimise the implementation of new electricity connection assistance in some districts in Bengkulu Province include socialising the new electricity connection assistance to underprivileged communities. (4) Looking ahead, with electricity reaching even the remotest villages, it is hoped that communities that have received new electricity connection assistance will utilise the assistance effectively, such as by using it to establish small and medium enterprises (SMEs) that can serve as additional income sources for those communities.*

Conclusion. *The implementation of new electricity connection assistance in some districts in Bengkulu Province has been progressing fairly well, although it still faces challenges in coordination and network coverage, and requires improved socialisation and data synchronisation to support more productive use of electricity for the welfare of the community.*

Keywords: Implementation, Policy, New Electricity Connection Assistance

DOI: <https://doi.org/10.52188/jeas.v6i1.1336>

©2025 Authors by Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon



Pendahuluan

Listrik merupakan bentuk energi sekunder yang dihasilkan dari energi primer yang berasal dari fosil maupun non fosil, energi primer yang berasal dari fosil seperti batubara, minyak bumi

dan sumber energi tak terbarukan, sedangkan energi primer yang berasal dari non fosil yaitu panas bumi, angin, air dan energi terbarukan lainnya.

Hanif Nurcholis (2007:11) mengemukakan ketersediaan tenaga listrik yang memadai dan tepat sasaran akan memacu perkembangan pembangunan daerah seperti sektor industri, komersial, pelayanan publik dan bahkan kualitas hidup masyarakat dengan semakin banyaknya warga yang menikmati energi listrik. Kemudian secara langsung maupun tidak langsung, hal itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Michael P. Tudaro dan Stephen C. Smith (2011:11) mengemukakan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi disuatu negara. Pembangunan ekonomi adalah suatu usaha untuk meningkatkan produktifitas dari pemanfaatan sumberdaya potensial yang dimiliki oleh suatu wilayah atau suatu negara. Pembangunan haruslah dipandang sebagai proses multidimensi yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga nasional, serta percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan, dan penanggulangan kemiskinan.

Sondang (2003:4) menyatakan pembangunan merupakan suatu proses yang terus menerus dilaksanakan melalui suatu perencanaan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dalam segala aspek, yang mana untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik secara materil maupun secara spiritual. Salah satu aspek yang amat penting dalam Pembangunan tersebut adalah Pembangunan ekonomi. Suryana (2000:3) mengemukakan Pembangunan ekonomi itu pada dasarnya meliputi usaha masyarakat secara keseluruhan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari listrik memiliki peranan yang sangat penting, baik dalam skala rumah tangga maupun skala industri. Di zaman yang modern ini, penggunaan listrik skala rumah tangga tidak hanya digunakan sebagai penerangan tetapi dapat juga digunakan untuk alat elektronik rumah tangga seperti kompor listrik, AC, TV dan lainnya. Sedangkan pada skala industri, listrik termasuk kebutuhan yang sangat vital bagi pabrik tanpa listrik segala aktifitas pabrik-pabrik tidak dapat berjalan dikarenakan listrik berfungsi untuk menggerakkan alat-alat industri.

Menurut Tulus (2011:49) ada faktor-faktor yang dianggap sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu faktor ketersediaan dan kondisi infrastruktur, hukum, stabilitas politik, kebijakan pemerintah dan birokrasi. Sehingga Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan bagi masyarakat merupakan prasarana yang penting yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Di dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026, Rasio Elektrifikasi masuk kedalam indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Provinsi Bengkulu. Berdasarkan RPJMD Provinsi Bengkulu terdapat tujuan untuk meningkatnya akses energi yang handal dan berkeadilan bagi masyarakat dengan indikator tujuan Rasio Elektrifikasi, adapun target Rasio Elektrifikasi sampai dengan periode akhir RPJMD tersebut sebesar 99,99%.

Program bantuan pasang baru listrik ini ditujukan untuk rumah tangga miskin yang belum memiliki listrik yang bersumber dari PLN, program ini dapat diajukan oleh masyarakat yang belum memiliki listrik yang akan dilakukan verifikasi untuk memutuskan bahwa pengajuan tersebut diterima. Penentuan penerima berdasarkan kriteria masyarakat miskin dan kesesuaian data masyarakat yang mengajukan dengan kondisi dilapangan.

Berdasarkan Hasil Pembahasan Desk Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dalam upaya peningkatan Rasio Elektrifikasi serta

peningkatan kesejahteraan masyarakat melakukan program kegiatan bantuan pasang baru listrik untuk 230 RT.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, peneliti berkeinginan meneliti lebih jauh dan tersusun ke dalam penelitian Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut; 1) Untuk menganalisis implementasi kebijakan bantuan pasang baru listrik di Provinsi Bengkulu. 2) Untuk menganalisis hambatan dalam implementasi kebijakan bantuan pasang baru listrik di Provinsi Bengkulu. 3) Untuk menganalisis upaya apa yang dilakukan guna mengoptimalkan implementasi kebijakan bantuan pasang baru listrik di Provinsi Bengkulu.

Bahan dan Metode

Sampel

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian seperti Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu, Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, PLN Bengkulu, dan Masyarakat penerima manfaat. Sedangkan objek penelitian ini adalah penerapan bantuan pasang baru listrik Provinsi Bengkulu. Pada penelitian ini instrumen yang akan digunakan terkait dengan pertanyaan, tujuan dan manfaat penelitian serta data yang ingin dikumpulkan adalah menggunakan metode penelitian kualitatif.

Organisasi penelitian

Perspektif penelitian dalam hal ini adalah cara pandang peneliti dalam memberikan tingkat kebebasan kepada responden dalam memberikan data atau informasi yang hendak disajikan. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang berperspektif emik, yakni pendekatan penelitian yang perolehan datanya dalam bentuk narasi, cerita detail, ungkapan dan bahasa asli hasil konstruksi para responden atau informan, tanpa ada evaluasi dan interpretasi dan peneliti. Data dalam bentuk cerita detail tersebut hanya dapat diperoleh, karena teknik pengumpulan datanya adalah wawancara mendalam dan atau observasi, bukan kuesioner. Dengan demikian tingkat kebebasan perspektif emik yang diberikan kepada responden atau informan sangat tinggi (Hamidi, 2010:124-125).

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Nazir dalam Prastowo (2011:186), metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Instrument

Pada tahap ini penulis melakukan proses pengumpulan data yang telah ditetapkan berdasarkan fokus penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Pengertian teknik pengumpulan data menurut Arikunto (2016:134), adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, dimana cara tersebut menunjukkan pada suatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya. Dalam hal pengumpulan data ini, penulis terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi

Sugiyono (2014:310), menyatakan observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini menggunakan observasi partisipasi, dimana peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

2. Metode Wawancara

Moleong (2017:135), menyatakan wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, dimana seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari jawaban atas hipotesis yang disusun dengan ketat.

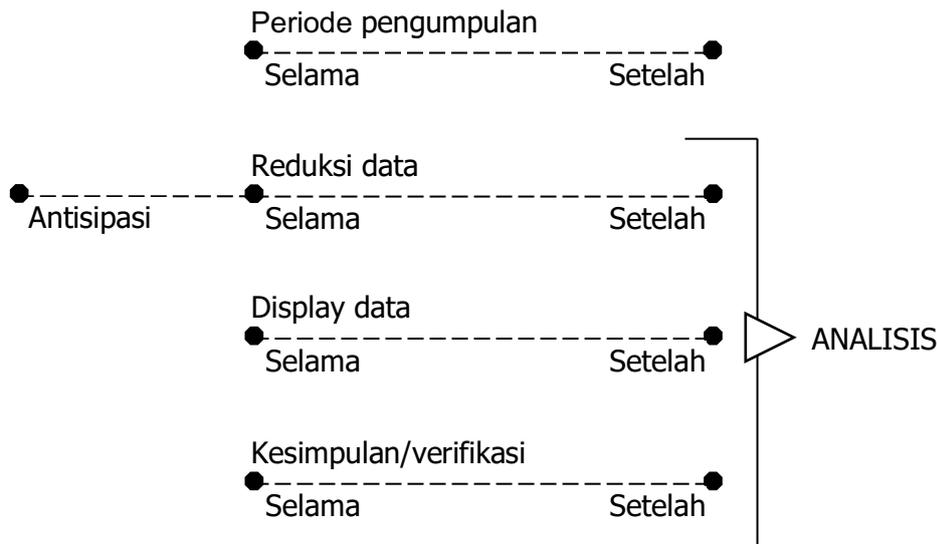
3. Metode dokumentasi

Arikunto (2016:149), menyatakan bahwa dokumentasi, dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Melalui metode dokumentasi, peneliti gunakan untuk menggali data dalam penelitian yang sedang dilakukan.

Teknik analisis data

Menurut Sugiyono (2014:335-336), analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.

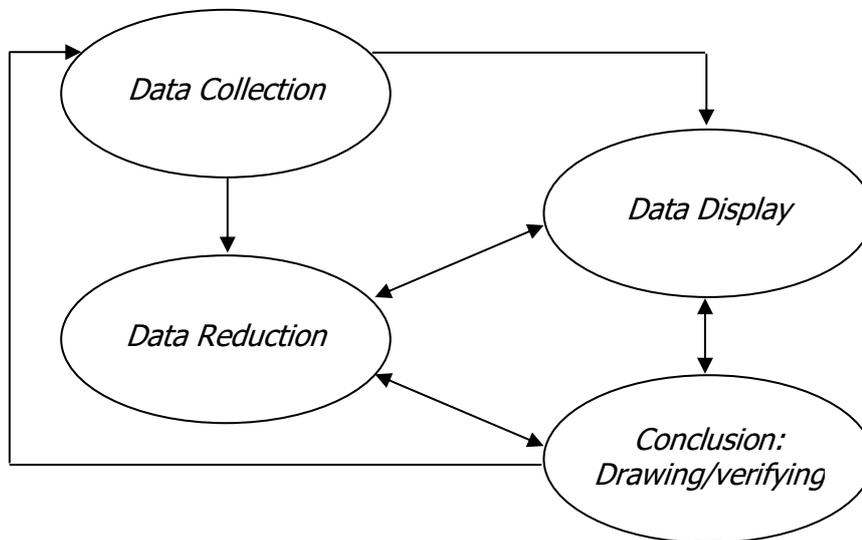
Langkah-langkah analisis data ditunjukkan pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Komponen Dalam Analisis Data (Flow Model)

Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa, setelah peneliti melakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan antisipatori sebelum melakukan reduksi data. Selain itu, dapat disimpulkan juga bahwa langkah-langkah analisis data antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan satu sama lain. Langkah-langkah tersebut tidak dapat dipisahkan ataupun dikerjakan secara tidak urut. Agar dapat menghasilkan data yang baik maka peneliti dalam menganalisis data harus sesuai dengan langkah-langkah yang ada.

Selanjutnya, model interaktif dalam analisis data ditunjukkan pada gambar di bawah ini:



Gambar 2. Komponen Dalam Analisis Data (Interactive Model)

Gambar di atas menunjukkan langkah-langkah yang ditempuh dalam analisis data menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014:341), yaitu sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (reduksi data), sebagai suatu proses pemilihan, pemusatan, perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan, sehingga data itu memberi gambaran yang lebih jelas tentang hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.
2. *Data Display* (penyajian data), yaitu sekumpulan informasi tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel, grafik, pictogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan sehingga akan semakin mudah dipahami.
3. *Conclusion Drawing* atau *Verification* (simpulan atau verifikasi), peneliti membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah diproses melalui reduksi dan display data. Penarikan kesimpulan yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Hasil

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana dan jelas agar mudah dibaca. Penyajian data juga dimaksudkan agar para pengamat dapat dengan mudah memahami apa yang diajukan untuk selanjutnya dilakukan penilaian atau perbandingan dan lain-lain. Data-data yang disajikan

merupakan hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis baik melalui proses wawancara, pencarian informasi melalui literatur, observasi dan dokumentasi kegiatan.

Kegiatan wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara penulis dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.

Teknik wawancara yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah wawancara terarah (*guided interview*), karena penulis sudah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada beberapa informan yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini informan yang ditentukan berjumlah 6 (delapan) orang yang berasal dari Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, UP 3 PLN Bengkulu, Kepala Desa dan masyarakat penerima manfaat.

Selain wawancara, penulis juga melakukan observasi dengan maksud untuk memperoleh gambaran secara nyata maksud penelitian yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik observasi partisipasi, yaitu kegiatan pengamatan yang dilakukan dengan keterlibatan penulis pada kegiatan yang dilakukan oleh informan. Dokumentasi yang ada dalam penelitian ini berupa foto wawancara antara penulis dengan informan.

Adapun pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai implementasi kebijakan bantuan pasang baru listrik di sebagian Kabupaten di Provinsi Bengkulu melalui program listrik gratis yang dilaksanakan oleh Dinas ESDM Provinsi Bengkulu.

1. Analisis Data

a. Implementasi kebijakan bantuan pasang baru listrik di Provinsi Bengkulu.

Listrik merupakan kebutuhan disaat sekarang tetapi masih terdapat masyarakat yang belum bisa menikmati listrik, dalam rangka penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat, pemerintah menyediakan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang, Pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan, dan Pembangunan listrik perdesaan.

Untuk pemenuhan energi listrik bagi rumah tangga tidak mampu dan meningkatkan rasio elektrifikasi, perlu memberikan akses pelayanan penyambungan jaringan tenaga listrik melalui bantuan pasang baru listrik.

Bantuan pasang baru listrik adalah bantuan pemasangan baru listrik bagi rumah tangga tidak mampu yang meliputi instalasi tenaga listrik dan biaya pemasangannya, biaya sertifikasi laik operasi, biaya penyambungan baru ke PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dan pengisian token listrik perdana.

Berkaitan dengan pengertian bantuan pasang baru listrik, berikut hasil wawancara dengan informan sebagaimana terlihat dalam kutipan wawancara dibawah ini.

Bapak Andri Gromiko selaku Inspektur Ketenagalistrikan Muda Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, menjelaskan:

“Program pasang baru listrik itu salah satu program dari Kementerian ESDM yang ditugaskan ke Ditjen Ketenagalistrikan untuk melaksanakan atau memberikan bantuan pasang baru listrik secara gratis ke masyarakat yang kategori tidak mampu.” (kutipan wawancara, hari selasa tanggal 2 Juli 2024).

Sedangkan untuk bantuan pasang baru listrik di Provinsi Bengkulu Bapak Andri Gromiko selaku Inspektur Ketenagalistrikan Muda Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, menjelaskan:

“Untuk bantuan pasang baru listrik di Provinsi Bengkulu itu namanya saja yang berbeda, kalo program pusatkan bantuan pasang baru listrik kalo ini kita hanya listrik gratis dalam listrik gratis itu kita fokusnya memang ke masyarakat tidak mampu.” (kutipan wawancara, hari selasa tanggal 2 Juli 2024)

Sedangkan bantuan pasang baru listrik menurut Muhammad Syafdinnur selaku Manager UP3 PLN Bengkulu, yaitu:

“Program pemerintah baik dari APBN maupun APBD yang menysasar pelanggan-pelanggan yang kurang mampu kalo tadi itu mulai dari biaya penyambungan, SLO (Sertifikat Laik Operasi), kemudian instalasi.” (kutipan wawancara, hari senin tanggal 8 Juli 2024).

Berdasarkan wawancara tersebut penulis mengetahui bahwa bantuan pasang baru listrik adalah bantuan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan listrik yang sumber pendanaannya dapat melalui APBN dan APBD.

Tabel 1. Jumlah Bantuan Pasang Baru Listrik bagi rumah tangga miskin

Tahun	Kabupaten	Rumah Tangga Miskin (RTM)
2022	1. Kabupaten Lebong	200
	2. Kabupaten Kepahiang	
	3. Kabupaten Bengkulu Selatan	
2023	1. Kabupaten Rejang Lebong	230
	2. Kabupaten Bengkulu Utara	
2024	1. Kabupaten Bengkulu Tengah	230
	2. Kabupaten Bengkulu Utara	
	3. Kabupaten Rejang Lebong	
	4. Kabupaten Kepahiang	
	5. Kabupaten Seluma	
	6. Kabupaten Bengkulu Selatan	
	7. Kabupaten Kaur	
	8. Kabupaten Lebong	

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Bengkulu

Dinas ESDM memiliki target jumlah RTM yang akan diberikan bantuan pasang baru listrik kurun waktu 2022 sampai dengan 2024. Bantuan pasang baru listrik melalui program listrik juga masuk kedalam Dokumen RPJMD Provinsi Bengkulu hal ini bisa dilihat didalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dalam pelaksanaan Bapak Andri Gromiko selaku Inspektur Ketenagalistrikan Muda Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, menjelaskan:

“Kalo dari provinsi Bengkulu kemaren memang pekerjaan ini sudah dari 2020 dianggarkan perencanaan awal itu 2020 namun karena memasuki pertengahan 2020 itu covid datang sehingga banyak anggaran dari daerah ini di plot atau ditarik ke kesehatan sehingga kegiatan seperti fisik pasang baru listrik gratis kemaren di

Tarik atau di off kan atau ditunda di 2020 2021 dimulai di 2022 dan itu sudah mau akhir kalo tidak salah pelaksanaannya.” (kutipan wawancara, hari selasa tanggal 2 Juli 2024).

Hal serupapun juga di ungkapkan Muhammad Syafdinnur selaku Manager UP3 PLN Bengkulu:

“Kalo saya masuk ke sini 2023 sudah ada mungkin 2 tahun sebelumnya sudah ada.” (kutipan wawancara, hari senin tanggal 8 Juli 2024).

Dari kesiapan Dinas ESDM dalam pelaksanaan bantuan pasang baru listrik Bapak Andri Gromiko selaku Inspektur Ketenagalistrikan Muda Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, menjelaskan:

“Persiapannya karena pekerjaan ini sudah dilakukan sudah dilakukan 2022 dan 2023 di 2024 ini kesiapannya mulai dari perencanaan awal, mulai dari pendataan, survey, koordinasi dengan PLN dan perangkat desa itu sudah berjalan sudah terjalin komunikasi itu sehingga hanya masalah masalah kecil yang kita anggap itu kadang posisi orang yang dikunjungi tidak ada tapi sebelumnya komunikasi itu sudah kita jalin sebelum pelaksanaan apakah itu survey apakah permintaan data dari daerah.” (kutipan wawancara, hari selasa tanggal 2 Juli 2024).

Pelaksanaan program bantuan pasang baru listrik diatur didalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2022 tentang Bantuan Pasang Baru Listrik Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu yang dijadikan petunjuk teknis bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program listrik gratis di Provinsi Bengkulu.

Untuk saat ini belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang bantuan pasang baru listrik di Provinsi Bengkulu, Bapak Andri Gromiko selaku Inspektur Ketenagalistrikan Muda Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, menjelaskan:

“Untuk peraturan daerah sampai dengan sekarang belum, belum ada, kita hanya meneruskan apa yang telah diintruksikan atau telah temaktub dalam peraturan Menteri ESDM nomor 3 tahun 2022 jadi kita teruskan kegiatan yang sama di daerah.” (kutipan wawancara, hari selasa tanggal 2 Juli 2024).

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Maryance Selveni selaku Subkoordinator Perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu:

“Tidak ada, seharusnya ada” (kutipan wawancara, hari rabu tanggal 3 Juli 2024).

Berdasarkan ketentuan calon penerima bantuan pasang baru listrik merupakan rumah tangga yang:

- 1) Belum tercatat sebagai pelanggan PT PLN (Persero); dan
- 2) Berdomisili di daerah yang telah tersedia jaringan tenaga listrik tegangan rendah PT. PLN (Persero) tanpa dilakukan perluasan jaringan.

Selain memenuhi ketentuan tersebut calon penerima bantuan pasang baru listrik harus:

- 1) Terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- 2) Berdomisili di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal; dan/atau

- 3) Berdasarkan validasi kepala desa/lurah atau pejabat yang setingkat layak menerima bantuan pasang baru Listrik

Adapun yang menjadi sasaran bantuan pasang baru listrik berdasarkan wawancara dengan Ibu Maryance Selveni selaku Subkoordinator Perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu:

“Berdasarkan arahan gubernur untuk bantuan seharusnya dari satu data yang dimiliki Dinas Sosial yaitu masyarakat yang masuk ke dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).” (kutipan wawancara, hari rabu tanggal 3 Juli 2024).

Bantuan pasang baru listrik di Provinsi Bengkulu belum menggunakan data dari DTKS sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Maryance Selveni selaku Subkoordinator Perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu:

“Tidak menggunakan data DTKS.” (kutipan wawancara, hari rabu tanggal 3 Juli 2024).

Kegiatan bantuan pasang baru listrik di Provinsi Bengkulu juga belum menyinkronkan dengan DTKS sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Maryance Selveni selaku Subkoordinator Perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu:

“belum ada.” (kutipan wawancara, hari rabu tanggal 3 Juli 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dapat peneliti ketahui bahwa belum adanya koordinasi dan sinkronisasi terkait penggunaan DTKS dalam bantuan pasang baru listrik.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno (2014:101-102). Menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Selanjutnya Nugroho (2014:36) menyebutkan bahwa kebijakan berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaannya yang tercakup didalamnya tujuan kebijakan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan penelitian penulis dengan judul Implementasi Kebijakan Pasang Baru Listrik di sebagian Kabupaten di Provinsi Bengkulu, jika dikaitkan dengan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Jones dalam Abidin (2010:199), terdiri atas tiga macam aktivitas, yaitu:

1) Organisasi

Organisasi yang merupakan pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit, dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak. Aktivitas pengorganisasian (*organization*), merupakan suatu upaya menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit-unit dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan atau merealisasikan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran dalam kebijakan. Organisasi dalam hubungan dengan pelaksanaan kebijakan dapat dikaitkan penentu unit-unit kerja yang ada, pembagian tugas dari masing-masing unit organisasi berupa sumber daya manusia, keuangan, dan sarana dan prasarana dalam organisasi.

Berkaitan dengan aktivitas organisasi tersebut, dalam menjalankan bantuan pasang baru listrik ini Pemerintah Provinsi Bengkulu menjalin koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait yang ada di Provinsi Bengkulu.

Bapak Andri Gromiko selaku Inspektur Ketenagalistrikan Muda Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, menjelaskan:

“Yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung ke kita yang pasti adalah PLN kemudian dinas sosial, BAPPEDA, kepala desa setempat yang BAPPEDA tadi adalah BAPPEDA kabupaten atau kota ya maupun provinsi, dinas sosial juga dinas sosial kabupaten kota juga provinsi, kecamatan, dan desa itu yang terlibat dalam proses pekerjaan atau kegiatan pasang baru listrik gratis ini untuk provinsi Bengkulu.” (kutipan wawancara, hari selasa tanggal 2 Juli 2024).

Hal serupa juga disampaikan oleh oleh Bapak Muhammad Syafdinnur selaku Manager UP3 PLN Bengkulu:

“Nanti kami koordinasi biasanya pemda atau pemerintah pusat akan mengirim data dan memang PLN yang tau kondisi dilapangan kami akan survey kalo memang belum ada sambungan listrik misalnya maka oke dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh APBN maupun APBD kalo sudah nanti kami kirim kalo ini sudah bisa dipasang.” (kutipan wawancara, hari senin tanggal 8 Juli 2024).

Berdasarkan dari penjelasan pihak Dinas ESDM, Ibu Maryance Selveni selaku Subkoordinator Perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu mengungkapkan:

“Tidak terlibat, baik itu pendataan tidak terlibat.” (kutipan wawancara, hari rabu tanggal 3 Juli 2024).

Berdasarkan penjelasan dari berbagai pihak peneliti mengetahui terkait koordinasi tentang bantuan pasang baru listrik bahwa telah terjalin koordinasi antara Dinas ESDM dan PLN Bengkulu tetapi belum terjalinnya koordinasi antara Dinas ESDM dan Dinas Sosial.

2) Interpretasi atau Pemahaman

Menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Aktivitas interpretasi (*interpretation*) merupakan aktivitas penjelasan substansi dan suatu kebijakan dalam bahasa yang operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh pelaku dan sasaran kebijakan. Abidin (2010:199), menggambarkan tentang suatu sistem kejiwaan (*behavior*) dari kebijakan yang berhubungan dengan pemahaman pelaksanaan maupun sasaran tentang kebijakan yang pada akhirnya dapat menerima atau menolak kebijakan tersebut. Pengaruh faktor kejiwaan dalam pelaksanaan kebijakan menjadi sangat penting bahkan lebih penting dari substansi itu sendiri. Disamping itu pemahaman masyarakat tidak terletak pada isi kebijakan tetapi juga cara pendekatan dan penyampaian serta cara melaksanakan suatu kebijakan. Interpretasi dalam kaitan dengan keberhasilan implementasi kebijakan mengangkut pemahaman mendalam tentang tujuan dan sasaran kebijakan sehingga dapat memberikan dukungan dengan melaksanakan tugas yang diberikan berhubungan dengan kebijakan tersebut.

Berkaitan dengan aktivitas interpretasi atau pemahaman tersebut, tujuan dari bantuan pasang baru listrik ini menurut Bapak Andri Gromiko selaku Inspektur Ketenagalistrikan Muda Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, yaitu:

“Tujuannya salah satu kan provinsi Bengkulu ini termasuk juga masyarakatnya banyak yang belum berlistrik jadi melalui program ini dan juga disambut juga dengan program dari peraturan Menteri ESDM nomor 3 tahun 2022 tentang bantuan pasang baru listrik jadi provinsi Bengkulu juga menganggarkan artinya melanjutkan apa yang diperintahkan oleh Kementerian ESDM jadi kita ikut mensupport kegiatan atau program dari kementerian tersebut makanya kita anggarkan tiap tahun.” (kutipan wawancara, hari Selasa tanggal 2 Juli 2024).

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Muhammad Syafdinur selaku Manager UP3 PLN Bengkulu:

“Tujuannya tentu pemerintah membantu rakyat kurang mampu sehingga mendapat penerangan dan tugas PLN sendiri menerangi negeri.” (kutipan wawancara, hari Senin tanggal 8 Juli 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas tujuan dari bantuan pasang baru listrik adalah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu yang belum berlistrik agar dapat menikmati listrik.

Untuk standar keberhasilan bantuan pasang baru listrik menurut Bapak Andri Gromiko selaku Inspektur Ketenagalistrikan Muda Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, yaitu:

“Keberhasilan itu bisa kita lihat dari berkurangnya data masyarakat yang belum berlistrik sehingga nanti berhubungan dengan data dari PLN bahwa elektrifikasi dari rasio elektrifikasi dari PLN itu akan naik” (kutipan wawancara, hari Selasa tanggal 2 Juli 2024).

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Muhammad Syafdinur selaku Manager UP3 PLN Bengkulu:

“Standarnya terpasang di rumah-rumah yang sudah dituju yang sudah disurvei target, kalo standar jangka panjangnya pasti adanya perbaikan kalo tadinya masih gelap kemudian sudah ada lampu, dengan ada listrik ongkos hidup bakal lebih murah karena PLN jauh lebih murah dibandingkan genset ataupun lilin.” (kutipan wawancara, hari Senin tanggal 8 Juli 2024).

Berdasarkan hasil wawancara tentang standar keberhasilan bantuan pasang baru listrik, penulis mengetahui bahwa standar keberhasilan pelaksanaannya yaitu berkurangnya masyarakat kurang mampu yang belum mendapatkan listrik dan adanya perubahan dari penggunaan genset atau lilin ke penggunaan listrik dari PLN.

3) Penerapan

Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program. Abidin (2010:199), mengemukakan tentang keberhasilan implementasi kebijakan dari pendekatan prosedural, yang berupa langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan kebijakan. Sesuai dengan prosedur tersebut,

maka yang terpenting dalam implementasi adalah berdasarkan urutan pentingnya maupun prioritas menurut waktunya. Bertolak dari pemikiran tentang aplikasi atau penerapan program, maka aplikasi tersebut sangat erat kaitannya dengan prosedur dan tata kerja kebijakan yang biasanya berupa petunjuk pelaksana kebijakan.

Berkaitan dengan aktivitas penerapan perlu adanya mekanisme dalam memberikan bantuan pasang baru listrik, secara ringkas Bapak Andri Gromiko selaku Inspektur Ketenagalistrikan Muda Dinas ESDM Provinsi Bengkulu menjelaskan:

“Secara ringkas itu pertama masyarakat atau melalui kepala desa mengirimkan proposal atau usulan ke dinas ESDM baik secara hotline maupun offline kemudian data tersebut kita rekap kita sampaikan atau kita ajukan ke pihak PLN kemudian PLN memverifikasi apakah lolos subsidi atau tidak nah yang lolos subsidi dia (PLN) sampaikan lagi ke kita dinas teknis (dinas ESDM) kemudian dinas ESDM akan membentuk tim untuk melakukan validasi kelengkapan apakah memang benar-benar real masyarakat tersebut masuk kategori tidak mampu atau tidak kemudian data tersebut sesudah kita survey seluruh usulan tersebut yang lolos baru kemudian kita bikin SK kemudian kita proses pengadaannya kemudian oleh pihak ke tiga melakukan pemasangan.” (kutipan wawancara, hari selasa tanggal 2 Juli 2024).

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Muhammad Syafdinnur selaku Manager UP3 PLN Bengkulu:

“Pertama pemda atau pemprov mengirim kami data-data, kemudian kami survey dan apabila sudah oke dan apabila belum punya listrik semua dan dekat dengan jaringan, nanti kami keluarkan nomor register untuk dibayarkan oleh Pemprov secara kolektif, nanti kami pecah satu satu untuk jadi ID pelanggan.” (kutipan wawancara, hari senin tanggal 8 Juli 2024).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Romadhan selaku Kepala Desa Sri Kuncoro:

“Iya pak memang usulan dari desa karena melihat masyarakat masih banyak yang belum punya listrik, masih numpang sama tetangga jadi kami mengajukan ke pemerintah provinsi.” (kutipan wawancara, hari sabtu tanggal 6 Juli 2024).

Terdapat mekanisme pengajuan penerimaan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan pasang baru listrik yang telah ditetapkan oleh Dinas ESDM sebagaimana penjelasan dari Bapak Andri Gromiko selaku Inspektur Ketenagalistrikan Muda Dinas ESDM Provinsi Bengkulu:

“Untuk dari dinas kemaren memang di instruksikan kepala dinas kemaren untuk dua model secara online maupun secara offline, secara online itu melalui hotline yang telah disampaikan di beberapa media yang ada di provinsi Bengkulu seperti RB TV, media cetak, maupun media elektronik itupun sudah disampaikan kemudian yang dari offline itu kita bersurat ke bappeda untuk menyampaikan atau ke kepala desa langsung yang kita punya kontak atau kita hubungi per kecamatan atau per kabupaten untuk mengirimkan data melalui kepala desanya.” (kutipan wawancara, hari selasa tanggal 2 Juli 2024).

Dalam penerapan bantuan pasang baru listrik ini tidak ada biaya pungutan bagi masyarakat kurang mampu yang mendapatkan bantu sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Kusyadi selaku masyarakat penerima manfaat:

“Tidak ada sama sekali.” (kutipan wawancara hari sabtu tanggal 6 Juli 2024).

Hal yang sama juga diungkapkan Bapak Agung selaku masyarakat penerima manfaat:

“Tidak ada biaya pungutan.” (kutipan wawancara hari sabtu tanggal 6 Juli 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dapat penulis simpulkan bahwa implementasi kebijakan bantuan pasang baru listrik di Provinsi Bengkulu sudah dilaksanakan dan diterima oleh masyarakat kurang mampu yang belum mendapatkan listrik.

a. Hambatan dalam implementasi kebijakan bantuan pasang baru listrik di Provinsi Bengkulu.

Dalam pelaksanaan bantuan pasang baru listrik terdapat beberapa hambatan seperti proses penginputan data, masih terdapatnya perbedaan data masyarakat antara saat mendaftar dan realita di lapangan, belum adanya jaringan listrik untuk dapat mengaliri listrik dari sumber listrik PLN ke masyarakat penerima bantuan, keterbatasan hari kerja.

Bapak Andri Gromiko selaku Inspektur Ketenagalistrikan Muda Dinas ESDM Provinsi Bengkulu menjelaskan:

“Sangat minim kendala hanya proses setiap kegiatan itu butuh proses kadang kalo tidak sabar dengan proses itu mungkin banyak yang kita lewati namun untuk ketemu hambatan atau masalah dilapangan itu sampai dengan sekarang alhamdulillah sudah berjalan dengan yang direncanakan namun kadang ada waktu yang kita temui seharusnya kita proses sekarang ternyata itu dihari libur panjang artinya ada yang tertunda untuk kita survey, namun sewaktu kita survey juga antusias dari masyarakat maupun perangkatnya sudah siap menemani kita untuk survey door to door ke masyarakat, mereka sudah lama menunggu kedatangan kita namun proses step by step di dinas kan kita selesai kan dulu baru survey ke lapangan kadang proses data penginputan itu yang seharusnya kita minta dua minggu ternyata tim dari PLN pun sama seperti kita mereka ada dinas luarnya juga ada liburnya juga atau ada cutinya juga sehingga keanggotaan mereka atau tim mereka untuk membantu yang biasanya selesai dengan dua minggu hanya sebulan.” (kutipan wawancara, hari selasa tanggal 2 Juli 2024).

Hal yang sama juga diungkapkan Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Muhammad Syafdinnur selaku Manager UP3 PLN Bengkulu:

“Sebagian besar tidak ada hambatan, palingan temuan kami sebagian sudah ada yang berlistrik. Untuk jaraknya yang lebih dari 100 meter untuk nanti disambung atau ditambah jaringan baru.” (kutipan wawancara, hari senin tanggal 8 Juli 2024).

Dalam pelaksanaan survey terhadap masyarakat yang mengusul terdapat hambatan yang dialami oleh Dinas ESDM sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Andri Gromiko selaku Inspektur Ketenagalistrikan Muda Dinas ESDM Provinsi Bengkulu:

“Sewaktu survey ternyata ada beberapa desa itu dia gak tau itu miskin atau kaya semua didata semua diusulkan jadi tidak ada nanti perangkat desa yang disalahkan, jadi mereka usulkan mau sikaya mau simiskin. Di lapangan itu kadang kita temukan bahwa data NIK antara rumah si A dan si B itu sama makanya kita cocokan NIKnya kita tidak tahu letak salahnya dimana tapi ada yang kita temukan, kategorinya sama-sama tidak mampu dan selesai kita di satu desa tim langsung rapat baik dimobil atau tempat kepala desa atau kantor kepala desa sendiri, pertimbangan-pertimbangan atau dokumentasi apa yang kita punya dan kita langsung bisa memvonis layak atau tidak.” (kutipan wawancara, hari selasa tanggal 2 Juli 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat penulis simpulkan bahwa terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan bantuan pasang baru listrik di Provinsi Bengkulu seperti kesesuaian data dalam proses survey dan penentuan waktu pelaksanaan.

b. Upaya yang dilakukan guna mengoptimalkan implementasi kebijakan bantuan pasang baru listrik di Provinsi Bengkulu

Untuk mendorong terwujudnya implementasi kebijakan bantuan pasang baru listrik di sebagian Kabupaten di Provinsi Bengkulu, maka perlu ada upaya-upaya yang dilakukan guna memperlancar implementasi kebijakan tersebut. Beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain:

- 1) Pembuatan peraturan daerah yang mengatur tentang bantuan pasang baru listrik di Provinsi Bengkulu
- 2) Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar OPD dan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan bantuan pasang baru listrik.
- 3) Melakukan sinkronisasi data antara masyarakat yang mengajukan bantuan dengan DTKS.
- 4) Memperluas jaringan instalasi PLN ke daerah permukiman yang belum mendapatkan listrik.
- 5) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang kurang mampu.

Berkaitan dengan upaya yang dilakukan guna mengoptimalkan implementasi kebijakan bantuan pasang baru listrik di sebagian Kabupaten di Provinsi Bengkulu Bapak Andri Gromiko selaku Inspektur Ketenagalistrikan Muda Dinas ESDM Provinsi Bengkulu menjelaskan:

“Sosialisasinya kita selain dari media elektronik atau media cetak atau medsos (media sosial) itu sendiri melalui Instagram atau website dari dinas ESDM itu sendiri itu juga kita sampaikan ke kabupaten atau kota bahwa untuk masyarakat-masyarakat mereka yang belum mampu atau belum mampu untuk pasang listrik kita mohon untuk usulannya ke dinas itupun kita titipkan pesan atau titipkan amanat ke temen-temen yang ada koordinasi atau sinkronisasi data terkait apapun itu namun kita titipkan promosi kegiatan ini ke kabupaten baik mereka apakah ke bappeda atau ke dinas sosial kita titipkan pesan ini.” (kutipan wawancara, hari selasa tanggal 2 Juli 2024).

Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa ada upaya dalam mengoptimalkan implementasi bantuan pasang baru listrik melalui sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat kurang mampu.

c. Forecast kedepan apa yang yang bisa di capai dari kebijakan bantuan pasang baru listrik di sebagian Kabupaten di Provinsi Bengkulu

Daya saing suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas infrastruktur yang dibangun. Provinsi Bengkulu sebagai provinsi yang secara

geografis terletak di paling barat Sumatera memiliki potensi yang untuk menjadi beranda baru di pesisir barat. Provinsi Bengkulu berbatasan langsung dengan 4 provinsi besar di Sumatera, serta berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Secara geografis, Provinsi Bengkulu sangatlah strategis karena memiliki potensi kerjasama di Afrika dan Asia Selatan, serta dapat menjadi jalur Tol Laut Indonesia. Saat ini Provinsi Bengkulu sedang gencar untuk mensejajarkan diri dengan provinsi lain di Indonesia, melalui pembangunan infrastruktur strategis yang berkelanjutan.

Saat ini tercatat ada 18 pembangkit listrik di Provinsi Bengkulu. Pembangkit Listrik sangat berperan penting dalam peningkatan daya saing infrastruktur dikarenakan mejadi suplai energi untuk produksi. Provinsi Bengkulu memiliki PLTP Hulu Lais berkekuatan 2 x 55 MW dan PLTU Pulau Baai dengan kapasitas 2 x 100 MW. Dengan banyaknya pembangkit listrik, maka surplus listrik di Bengkulu akan dapat disalurkan sebagai interkoneksi Pulau Sumatera.

Total DMN (Daya Mampu Netto) pembangkit tenaga listrik yang ada di Provinsi Bengkulu tahun 2018 adalah sekitar 272 MW yang didominasi oleh pembangkit perusahaan PT PLN (Persero) sekitar 269 MW (99%), dan Non PT PLN (Persero) sekitar 3 MW (1%) . Adapun berdasarkan jenisnya, DMN pembangkit tersebut didominasi oleh PLTA sekitar 247 MW (90,7%), PLTD sekitar 16 MW (5,9%), PLTMH sekitar 6 MW (2,2%), PLTBg sekitar 3 MW (1,1%), dan PLTS sekitar 0,3 MW (0,1%). Konsumsi energi listrik di Provinsi Bengkulu tahun 2018 mencapai sekitar 913 GWh dengan komposisi konsumsi per sektor pemakai didominasi oleh sektor rumah tangga sekitar 669 GWh (73%), bisnis sekitar 120 GWh (13%), publik sekitar 71 GWh (8%), dan industri sekitar 53 GWh (6%). Adapun rasio elektrifikasi tahun 2018 mencapai sekitar 99,96%.

Peranan subsektor listrik dimana peranan subsektor ini dalam perekonomian Provinsi Bengkulu sangat kecil. Selama kurun waktu 2015-2019 kontribusi subsektor listrik dalam PDRB kurang dari 1 persen per tahun. Pembangunan infrastruktur kelistrikan dalam upaya untuk mencukupi kebutuhan listrik di Provinsi Bengkulu terus diupayakan, baik melalui peningkatan kinerja pembangkit listrik tenaga diesel yang telah ada, penambahan mesin-mesin pembangkit listrik baru, serta melalui pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Kinerja Perusahaan Listrik Negara (PLN) cabang Bengkulu pada kurun waktu 2016-2019 relatif meningkat. Hal itu terlihat dari jumlah desa yang dialiri listrik pada tahun 2019 sebanyak 1513 desa, meningkat dari tahun sebelumnya.

Ketersediaan pasokan listrik merupakan salah satu faktor utama yang menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan pada berbagai sektor perekonomian seperti industri, perdagangan, dan sebagainya. Dengan adanya kegiatan bantuan pasang baru listrik ini diharapkan dapat membantu masyarakat tidak mampu untuk memasang listrik secara gratis, kegiatan ini juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan Rasio Elektrifikasi Provinsi Bengkulu, dengan adanya listrik yang menjangkau hingga ke pelosok desa diharapkan bagi masyarakat yang telah mendapatkan bantuan pasang baru listrik dapat memanfaatkan bantuan dengan sebaik-baiknya seperti dipergunakan untuk membangun kegiatan UKM yang dapat dijadikan tambahan penghasilan bagi masyarakat tersebut.

Pembahasan

Pemerintah Provinsi Bengkulu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan rasio elektrifikasi dengan melakukan bantuan pasang baru listrik melalui program listrik gratis kepada masyarakat kurang mampu di Provinsi Bengkulu. Dalam

pelaksanaan bantuan pasang baru listrik, Dinas ESDM Provinsi Bengkulu diberikan tanggung jawab dan pendanaan yang bersumber dari APBD untuk melaksanakan kegiatan ini.

Dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan bantuan pasang baru listrik diatur didalam beberapa regulasi seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Selanjutnya belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pelaksanaan bantuan pasang baru listrik di Provinsi Bengkulu.

Jika dikaitkan dengan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Jones dalam Abidin (2010:199) terdiri dari 3 (tiga) aktivitas yaitu organisasi, interpretasi/pemahaman, dan penerapan. Berkaitan dengan aktivitas organisasi, Dinas ESDM Provinsi Bengkulu selaku OPD yang melaksanakan kegiatan bantuan pasang baru listrik, melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder yang terlibat untuk mendukung optimalnya pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaannya kegiatan bantuan pasang baru listrik ditujukan untuk masyarakat kurang mampu yang belum mendapatkan listrik harapannya dengan diberikan bantuan ini masyarakat yang tadinya belum dapat menikmati listrik menjadi dapat menikmati listrik agar dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Untuk mendapatkan bantuan pasang baru listrik, Dinas ESDM Provinsi Bengkulu gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik secara *online* melalui media massa dan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Whatsapp ataupun secara *offline*. Bagi masyarakat yang merasa butuh mendapatkan bantuan pasang baru listrik untuk dapat mengusulkan melalui hotline atau *offline* kepada Dinas ESDM. Usulan yang masuk ke Dinas ESDM akan dilakukan verifikasi dan survey untuk menentukan masyarakat tersebut berhak mendapatkan bantuan pasang baru listrik.

Berkaitan dengan aktivitas interpretasi atau pemahaman bahwa standar keberhasilan bantuan pasang baru listrik yaitu berkurangnya masyarakat kurang mampu yang belum mendapatkan listrik dan adanya perubahan dari penggunaan genset atau lilin ke penggunaan listrik PLN. Dalam implementasi kebijakan bantuan pasang baru listrik terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi yaitu seperti ketidak sesuaian data pengusul dengan realita yang ada dilapangan, ini dikarenakan usulan dari Kepala Desa yang mencatat keseluruhan masyarakat di desa tersebut tanpa dilakukan verifikasi terlebih dahulu dan kendala lainnya seperti rumah masyarakat yang akan mendapatkan bantuan pasang baru listrik berada diluar radius jaringan listrik PLN sehingga rumah tersebut tidak dapat dipasangkan aliran listrik.

Berkaitan dengan aktivitas penerapan bahwa implementasi kebijakan bantuan pasang baru listrik di Provinsi Bengkulu sudah dilaksanakan dan diterima oleh masyarakat kurang mampu yang belum mendapatkan listrik. Upaya yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan kebijakan bantuan pasang baru listrik antara lain perlu meningkatkan koordinasi dengan stakeholder lain yang mendukung kebijakan bantuan pasang baru listrik dan Dinas ESDM Provinsi Bengkulu lebih gencar dalam mensosialisasikan kebijakan bantuan pasang baru listrik.

Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi bantuan pasang baru listrik di sebagian kabupaten di Provinsi Bengkulu telah berjalan dengan cukup baik, meskipun masih menghadapi beberapa kendala. Dari sisi koordinasi, telah terjalin kerja sama antara Dinas ESDM dan PLN Bengkulu, namun koordinasi dengan Dinas Sosial masih perlu ditingkatkan. Implementasi program ini telah sesuai dengan hasil pembahasan pada Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri. Pemahaman keberhasilan program diukur dari berkurangnya masyarakat kurang mampu yang belum memperoleh akses listrik serta peralihan dari penggunaan lilin atau genset ke listrik PLN. Kendala yang dihadapi meliputi

ketidaksesuaian data pengusul dengan kondisi lapangan dan keterbatasan jangkauan jaringan listrik. Secara umum, bantuan ini telah diterima oleh masyarakat yang membutuhkan, namun masih diperlukan sosialisasi yang lebih luas. Ke depan, diharapkan bantuan ini dapat dimanfaatkan secara produktif oleh masyarakat, misalnya untuk pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) guna meningkatkan kesejahteraan. Adapun strategi optimalisasi pelaksanaan bantuan ini meliputi penyusunan regulasi daerah, peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan, sinkronisasi data penerima dengan DTKS, perluasan jaringan listrik, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat kurang mampu. Dengan masuknya listrik hingga ke pelosok desa, diharapkan taraf hidup masyarakat dapat meningkat secara signifikan.

Daftar pustaka

- Abidin, S. Z. (2010). Kebijakan publik. Yayasan Pancur Siwah.
- Agustino, L. (2017). Dasar-dasar kebijakan publik. Alfabeta.
- Arikunto, S. (2016). Metode penelitian kualitatif. Bumi Aksara.
- Audina, M., & Saputra, A. (2023). Program bantuan sosial listrik gratis bagi masyarakat miskin di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Malikussaleh*, 4(1), 112–121.
- Keban, Y. T. (2012). Enam dimensi strategis administrasi publik: Konsep, teori dan isu. Gava Media.
- Kusumanegara, S. (2010). Model dan aktor dalam proses kebijakan publik. Gava Media.
- Jismi, M. (2019). Pemberdayaan masyarakat kurang mampu melalui program bantuan listrik di Kabupaten Aceh Jaya [Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry].
- Intan, S. (2019). Dampak industri listrik terhadap sosial ekonomi masyarakat Kampung Nelayan Belawan [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara].
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif. PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Mustopadidjaja, A. R. (2010). Manajemen proses kebijakan publik. Lembaga Administrasi Negara (LAN).
- Nasution. (2011). Metode research (penelitian ilmiah). Bumi Aksara.
- Nugroho, R. D. (2014). Kebijakan publik: Formulasi, implementasi, evaluasi. PT Elex Media Komputindo.
- Nurcholis, H. (2007). Teori dan praktek pemerintahan dan otonomi daerah. Gramedia.
- Pasolong, H. (2017). Teori administrasi publik. Alfabeta.
- Prastowo, A. (2011). Metode penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian. Ar-Ruzz Media.
- Siagian, S. P. (2003). Administrasi pembangunan: Konsep, dimensi, dan strateginya. Bumi Aksara.
- Subarsono, A. G. (2015). Analisis kebijakan publik: Konsep, teori dan aplikasi (Cet. 7). Pustaka Pelajar.
- Sugiharto. (2019). Analisis pengaruh infrastruktur jalan dan listrik terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Utara tahun 2007–2016 dalam perspektif ekonomi Islam [Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung].
- Sugiyono. (2014). Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif dan kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2011). Metode penelitian pendidikan. Remaja Rosdakarya.
- Sunggono, B. (2010). Hukum dan kebijakan publik. Insan Cendikia.
- Suryana. (2000). Ekonomi pembangunan. Salemba Empat.
- Tambunan, T. T. (2011). Perekonomian Indonesia: Kajian teoritis dan analisis empiris. Galia Indonesia.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). Pembangunan ekonomi (Edisi ke-11). Erlangga.

- Wahab, S. A. (2012). Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik (Cet. 3). Bumi Aksara.
- Wibawa, S. (2010). Kebijakan publik: Proses dan analisis (Cet. 5). Intermedia.
- Widodo, J. (2012). Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik. Bayu Media.
- Winarno, B. (2014). Kebijakan publik: Teori & proses. Media Pressindo.

Information about the authors:

Aji Umar Za: ajimobilindo73@gmail.com, Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama). indonesia

Prof. Dr. Ir. Triyuni Soemartono, MM: triyuni@dsn.moestopo.ac.id, Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama). Indonesia

Dr. Roy Tumpal Pakpahan, M.Si: roy.tumpal@gmail.com, Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama). Indonesia

Cite this article as: Za, Aji Umar. Et al .(2025). Implementasi Kebijakan Bantuan Pasang Baru Listrik Di Sebagian Kabupaten Di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Jembatan Efektivitas Ilmu Dan Akhlak Ahlussunah Wal Jama'ah*, 6(1). 168-186. <https://doi.org/10.52188/jeas.v6i1.1336>